

**STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS HUTAN LINDUNG
DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**DASRIYANTO
97342.2009**

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2013

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Strategi Peningkatan Kualitas Hutan Lindung Dalam Penataan
Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Dasriyanto

TM/NIM : 2009/97342

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

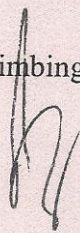
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 April 2013

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Suryanef, M.Si
19640606 199103 1 006

Pembimbing II

Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si
19730927 200501 1 004

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Senin tanggal 22 April 2013 pukul 13.30 s/d 15.00 WIB

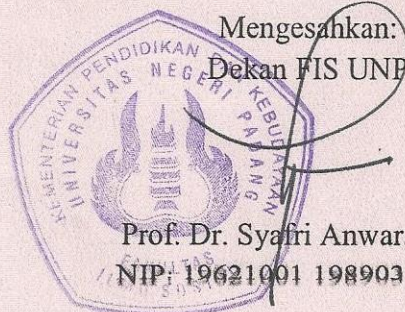
Strategi Peningkatan Kualitas Hutan Lindung Dalam Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Dasriyanto
TM/NIM : 2009/97342
Progran Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Padang, 22 April 2013

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Suryanef, M.Si	
Sekretaris	: Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si	
Anggota	: Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si	
Anggota	: Dra. Al Rafni, M.Si	
Anggota	: Lince Magriasti S.IP, M.Si	



Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.

NIP: 19621001 198903 1 002

SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmatNya, yang telah membuka pintu-pintu keilmuan, menjadikan hati kita senang menuntut dan mencintai ilmu, semoga Robb meninggikan derajat kita, derajat orang-orang yang menuntut ilmu dan derajat orang yang menyampaikannya.

Shalawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan umat sedunia, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan dalam mengemban amanah di permukaan bumi ini. Semoga kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah dan para sahabat berada dalam surganya Allah SWT. Amiin.

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap...” (QS. Al-Insyirah: 6-8)

...Yakinlah hanya dengan mengingat Allah SWT, hati kita menjadi tenang...

Ya Rabbana..., hamba menyadari sepenuhnya apa yang telah hamba perbuat dan apa yang telah hamba raih, semuanya itu tidak lepas dari Rahman dan Rahim Mu Ya Allah, dan juga atas segala ridho yang Engkau berikan. Hamba yakin ridho Allah ridhonya orang tua. Ya Allah., setiap ujian yang Engkau berikan dalam menapakki kehidupan, dalam mentadabburi ciptaan Engkau, maka semakin bertambah keyakinan hamba terhadap kebesaran Mu ya Allah, bahwa

Engkaulah yang menciptakan dan sekaligus penentu skenario kehidupan yang terindah di dunia ini, Engkaulah yang paling mengetahui pilihan yang terbaik dalam hidup hambaMu. Ya Rahman, semoga Engkau selalu membuka pintu hati untuk menuntut ilmu dan cinta terhadap ilmu.

Karya ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan kasih sayang untuk Ayahanda dan Bunda, hingga kapanpun tak terbalas curahan kasih sayang yang kalian berikan, dengan penuh cucuran keringat dan segala pengorbanan yang tak ternilai dan yang tak terbalas olehku. Untuk adik-adik ku, Shinta yang selalu memberikan semangat, pengorbanan dan dukungan dalam menggapai cita – cita ini, serta yang special adikku Adek, keriangannya selalu menyinari setiap hariku dan Abang yakin di dalam hatimu terbentang kecurahan doa untukku. Serta untuk semua keluargaku besar ku yang telah mendukung sampai saat ini.

Ungkapan terima kasih kepada guru (dosen) yang telah banyak mencurahkan ilmu dan memberikan wawasan yang luas. Spesial untuk inspirator dan motivator —Bapak Suryanef, Bapak Rahmadani Yusran, Bapak Zikri, Bapak Yasril Yunus, Ibu Siska Sasmita, Ibu Nora dan semua dosen yang telah membimbingi dalam masa perkuliahan bapak/ibu selalu memupuk semangat saya. Dan ucapan terimakasih seluruh karyawan TV ISP Buk Mimi, Ni Sil, dan Indah yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Special untuk mu sahabat (Armeidi, Annisa dan Joffy) yang selalu memberikan semangat, motivasi, waktu, kesetiaan dan keceriaan semasa perkuliahan ini. Semoga kedepannya dirimu menyusul dan selalu ada untukku.

Sohib ku yang selama ini memberikan keceriaan semasa perkuliahan: Randi, Phuji, Ari, Roni, Hengki, Bang Barta, Arif, Daus, Arvan, Zendra, Nia, Ayu, Cipid, Meri, Siska, Indah, Heni, Gina, Naya dan dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya tuliskan namanya satu persatu karena begitu banyak, yang selama ini telah berjuang bersama-sama, baik itu dalam masa perkuliahan Ilmu Administrasi Negara, masa penelitian skripsi ini.

Seluruh kader HMI Komisariat Ilmu Sosial UNP, BEM FIS UNP, HMI ISOSPOL, IMANSTRA, Forum Integritas UNP-KPK I yang terus bergelora memperjuangkan hak mahasiswa dan rakyat. Semoga tetap Berjaya. Yakusa!!!!

Tak terlupakan teman-teman dari kos Astam dengan Boy Band-nya (Ridwan, Romi, Armeidi, Richi), Bang Ray, Bang Yori, Bang Siswo, dan Andreas. Teman, kebersamaan ini takkan aku lupakan, bagiku kebersamaan kita adalah anugerah yang terindah, semoga Allah meridhoi langkah kita, Amiin.

Hormat saya,

Dasriyanto, S. AP.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dasriyanto

NIM : 2009/97342

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Strategi Peningkatan Kualitas Badan Lindung Dalam Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 April 2013
Saya yang menyatakan,



Dasriyanto
2009/97342

ABSTRAK

Dasriyanto, 97342/2009: Strategi Peningkatan Kualitas Hutan Lindung dalam Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam penataan ruang wilayah di kabupaten Pesisir Selatan khususnya dalam usaha meningkatkan kualitas hutan lindung. Secara umum, pelaksanaan peningkatan kualitas hutan lindung di Pesisir Selatan dapat dikatakan kurang maksimal. Banyak masalah yang terjadi mulai dari kawasan rawan bencana hingga pengalih fungsian kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan strategi peningkatan kualitas hutan lindung dalam penataan ruang wilayah kabupaten Pesisir Selatan agar nyaman dan produktif, mengetahui hambatan yang dialami pemerintah daerah pesisir selatan dalam upaya peningkatan kualitas hutan lindung tersebut, dan memberikan upaya yang pas dengan kondisi permasalahan yang terjadi terkait peningkatan kualitas hutan lindung tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ditentukan langsung oleh peneliti yakni Bappeda Pesisir Selatan Bidang Fisik dan Prasarana, anggota Sekwan Kabupaten Pesisir Selatan, masyarakat pesisir selatan, masyarakat pinggir pantai, pinggir hutan, kepala kaum, adat dan pihak-pihak lain yang mendukung penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumentasi, serta alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kamera. Kemudian uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa terdapat sejumlah strategi dalam usaha peningkatan kualitas kawasan lindung di Pesisir Selatan ini. Strategi tersebut terdiri dari: melakukan sosialisasi dan melibatkan masyarakat kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kualitas hutan lindung, pelestarian dan penanaman pohon di sempadan pantai, rehabilitasi hutan TNKS, pembongkaran gubuk dan penyitaan barang bukti penebangan liar hutan, melakukan patrol rutin di sekitar hutan lindung, menata batas hutan lindung Negara dan batas hutan rakyat, strategi ini dinilai mampu dalam meningkatkan kualitas hutan lindung di kabupaten Pesisir Selatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho dan rahmatNya, skripsi yang berjudul **“Strategi Peningkatan Kualitas Hutan Lindung dalam Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan”** dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka mata hati dan pikiran kita akan pentingnya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana satu (S1) dengan gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang berkenan memberikan izin penelitian ini.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang yang telah menyetujui penelitian ini.
3. Bapak Drs. Karjuni Datuak Maani, M.Si. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang yang memberikan saran dan masukan dalam penelitian ini.

4. Bapak Drs. Suryanef, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan serta sebagai inspiratif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos M.Si, selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi, membimbing, dan memberi masukan serta motivator bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, Ibu Dra. Al Rafni, M.Si dan Ibu Lince Magriasti, S.IP. M.Si, selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Erixon. A.Pt, M.Si Kepala Bappeda Bidang Fisik dan Prasarana Pesisir Selatan yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi.
8. Bapak Dasrianto Putra, S.Sos, Kasi Pembinaan dan Pengembangan di Sekwan Pesisir Selatan telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai.
9. Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, serta seluruh keluarga yang telah memberikan do'a khususnya, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan do'a, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Rekan-rekan program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2009, terima kasih atas segala masukan dan sarannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan baik itu dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Meski begitu, penulis tetap berharap bahwa karya ini bisa menjadi banyak manfaat bagi semua pihak. Amin.

Padang, April 2013

Dasriyanto

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x

BAB I: Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah.....	9
3. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10

BAB II: Kajian Pustaka

A. Kajian Teori	12
1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	12
2. Konsep Tata Ruang Wilayah.....	19
3. Konsep Kawasan Lindung	27
4. Konsep Strategi	29

B. Kerangka Konseptual	30
------------------------------	----

BAB III: Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Informan Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
1. Jenis Data	35
2. Sumber Data	36
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	36
1. Wawancara	36
2. Teknik Observasi.....	37
3. Studi dokumentasi	37
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Temuan Umum Penelitian	40
B. Temuan Khusus Penelitian.....	50
1. Strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Meningkatkan Kualitas Hutan Lindung di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Agar Lebih Nyaman dan Produktif	50
2. Kendala Pemerintah Kabupaten Melaksanakan Strategi Peningkatan Kualitas Hutan Lindung	68

3. Upaya Pemerintah Kab. Pessel Mengatasi Kendala-kendala dalam Melaksanakan Strategi Peningkatan Kualitas Hutan Lindung	77
C. Pembahasan	83

BAB V. Penutup

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

REFERENSI

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Keadaan Geografi	43
-----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kebijakan dilihat sebagai variable bebas dan variable tergantung	15
Gambar 2.2 Proses Kebijakan Publik.....	20
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Peta Pesisir Selatan Secara Adminsitratif	41
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Bappeda	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Daftar Wawancara

Lampiran II. Dokumentasi Penelitian

Lampiran III. Kep.Menhut No. 143/ Menhut-IV/2012

Lampiran IV. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran V. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran IV. Prog. Laporan Pola Ruang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan ruang wilayah di Indonesia merupakan salah satu program pemerintah yang sangat penting dewasa ini, karena wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam. Misalnya bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami serta letusan gunung berapi. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun 2011 terjadi sebanyak 1.598 kasus bencana alam di Indonesia, terbilang cukup kecil dibandingkan tahun 2010 sebanyak 2.232 kasus. Sedangkan berdasarkan jumlah orang yang mengungsi, banjir mencapai 279.523 orang, erupsi gunung api 9.699 orang dan banjir dan longsor 9.053 orang. Daerah yang sering terjadi bencana contohnya yaitu daerah Sumatera, Papua dan Jawa (okezone.com : 2012)

Di Indonesia, selain masalah bencana alam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait dengan berbagai permasalahan yang bersifat kompleks. Antara lain berkaitan dengan terwujudnya ruang nusantara yang nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2005:13). Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tata ruang dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU No. 26-2007) bahwa tujuan dari penataan ruang adalah mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang menjadi sangat penting dan perlu menjadi pertimbangan di dalam proses penataan ruang, baik pada proses perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang untuk meminimalisir terjadinya konflik-konflik antar pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya pemerintah perlu memfasilitasi agar penyampaian aspirasi masyarakat dalam penataan ruang dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Saragih, 2011:11). Undang-undang No. 26 Tahun 2007 juga mengisyaratkan adanya kewajiban bagi setiap pemerintahan kabupaten dan kota di Indonesia untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Pengaturan penataan ruang tersebut dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang, hal ini dinyatakan dalam pasal 11 dan pasal 12 UU No. 26 Tahun 2007.

Di beberapa wilayah di Indonesia penataan ruang wilayah ini telah mulai berjalan, misalnya di daerah NAD. Di NAD, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mulai dibangun, diantaranya PKW Banda Aceh (kawasan perkotaan), PKW Sabang (kawasan Perkotaan), PKW Langsa (kawasan kota sedang), PKW Takengon (kawasan perkotaan kecil) dan PKW Meulaboh (kawasan kota sedang). Tidak hanya di Aceh, Papua Barat juga telah mulai melakukan penataan ruang wilayahnya, namun lebih diarahkan ke wilayah laut, mengingat potensi wilayah pesisir dan laut yang sangat besar di Provinsi Papua Barat. Begitupun dengan

provinsi Bali, pengembangan wilayah perkotaannya berasaskan falsafah Tri Hita Karena, disesuaikan dengan karakter social budaya masyarakat setempat, dengan orientasi ruang mengacu pada konsep catus patha dan tri mandala serta menerapkan arsitektur tradisional Bali. Dalam hal kawasan pertumbuhan ekonomi lebih difokuskan di kawasan strategis pelabuhan, bandar udara, industry celukan bawang, Metropolitan Sarbagita, dan perkotaan fungsi PKW.

Menurut Direktur Jendral Penataan Ruang (2005:5-6) dalam pelaksanaannya untuk tingkat Sumatera, Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera disusun sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan kemudian dirumuskan ke dalam kebijakan-kebijakan Pengembangan Kawasan Tertentu seperti kawasan perbatasan, kawasan Metropolitan maupun kawasan terpencil, Pengembangan Sistem Perkotaan, dan Pengembangan Sistem Prasarana Strategis. Rencana ini selanjutnya disusun menjadi Indikasi Program Strategis 5 tahunan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk masing-masing sektor. Selain penyiapan rencana untuk wilayah administratif (berupa RTRWN, RTR Pulau, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan Kota), disusun pula rencana pengembangan (*spatial development plan*) untuk kawasan-kawasan fungsional yang memiliki nilai strategis. Misalnya, untuk kawasan dengan nilai strategis ekonomi, maka disusun rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan andalan. Sementara itu untuk kawasan dengan nilai strategis pertahanan-keamanan (*security*), disusun rencana pengembangan kawasan perbatasan negara, baik di

darat maupun di laut. Selain itu juga disusun rencana pengembangan kawasan agropolitan (sentra-sentra produksi pertanian), dan sebagainya.

Meskipun demikian, tidak semua RTRW ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Indonesia berada dalam kondisi darurat tata ruang, proses perencanaan pembangunan Indonesia saat ini sangat menghawatirkan diakibatkan oleh berbagai inkonsistensi dalam proses perencanaan. Belakangan ada beberapa sinyal pemerintah yang dinilai kontra-produktif terhadap kaidah-kaidah perencanaan wilayah dan perkotaan nasional diantaranya keterlambatan proses legalisasi perda RTRW yang menyebabkan hanya 7 provinsi, 14 kabupaten dan 4 kota yang memiliki RTRW yang memiliki kepastian hukum berdasarkan UU 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, usulan kebijakan pemerintah berupa Masterplan Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025 dengan membangun 6 koridor koneksitas yang cenderung tidak mengacu pada RTRW dalam bentuk PP no 26 tahun 2008 dimana telah diatur pembagian fungsi dan peran seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan wilayah dan Kawasan Strategis serta proses pengambilan kebijakan perumahan melalui penyusunan UU perumahan dan pemukiman baru dan kecenderungan tidak terakomodasinya penyediaan perumahan di perkotaan bagi golongan tidak mampu.

Di kabupaten Pesisir Selatan, penataan ruang wilayah juga sudah mulai dilaksanakan, salah satunya yaitu perlindungan terhadap hutan lindung, namun belum berjalan secara maksimal, selain itu sarana dan prasarana dalam menunjang peningkatan kualitas hutan lindung juga masih minim (Bappeda Pesisir

Selatan:2011). Tidak hanya itu, keterbatasan akses menuju Painan yang merupakan ibu kota kabupaten ini juga menjadi sebuah permasalahan besar hingga sekarang, kota Painan hanya memiliki satu poros jalan, itupun rawan bencana longsor dan tsunami karena terletak di pesisir pantai Barat Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Selain itu, dalam upaya peningkatan kualitas hutan lindung, kualitas SDM sangat penting sekali, mengingat dengan tingginya kualitas SDM maka kecenderungan masyarakat untuk melakukan pengerusakan hutan dapat diminimalisir, apalagi kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat terjadinya bencana alam sangat tinggi.

Kawasan hutan lindung menurut perda No. 7 tahun 2011 kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Peningkatan kualitas hutan lindung merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan kehidupan yang berkesinambungan. Adapun kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkenaan dengan tata ruang yaitu *pertama*, peningkatan kualitas hutan lindung, *kedua*, perkuatan dan pemulihan fungsi hutan lindung, *ketiga*, pengembangan pemanfaatan sumber daya alam, *keempat*, pengurangan kesenjangan pembangunan utara-selatan, *kelima*, penguatan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 304/Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan di Sumatera Barat, maka kawasan hutan lindung di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 315,148 (54,38 %) dan kawasan Budidaya menjadi 264,347 Ha (45,62%), dari luas hutan yang ada itu terdiri hutan produksi (HP) 4,381 Ha atau (0,67%), Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) 28,629 Ha atau (4,94 %) Sedangkan hutan produksi terbatas 53,778 Ha atau 9,28 %, area penggunaan lainnya 177,559 Ha atau 30,64 %. Sementara berdasarkan kondisi yang terjadi pada saat sekarang, kondisi sangat kritis sekitar 23.575 hektare (4,1 persen), sedangkan kritis mencapai 31.624 hektare dan agak kritis seluas 105.223 hektare yang tersebar di 12 kecamatan yang ada. Dari luasan itu yang telah berhasil ditanggulangi dengan melakukan rehabilitasi hutan pada lahan-lahan sangat kritis seluas 10.562 hektare dimulai rehabilitasi tahun 2000 dan dari tahun 2010 hingga tahun 2012 luas hutan yang direhabilitasi bertambah 1200 Ha, dan pada tahun 2013 ini rencana akan direhabilitasi lagi sekitar 650 Ha hutan lindung.

Hutan lindung mendominasi penggunaan lahan di daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 435.031,63 ha, hutan lindung terluas ada di Kecamatan Lengayang dengan luas 56.009,97 ha hutan lindung dengan luas terkecil adalah Kecamatan Bayang seluas 4.088,08 ha. Luas terbangun terbesar ada di Kecamatan Lunang Silaut sebesar 117.85 ha dan luas terbangun paling sedikit terdapat di Kecamatan Batang Kapas sebesar 5,33 ha. Daerah perkebunan didominasi oleh Kecamatan Lunang Silaut 72.840,70 ha yang terkecil 70,28 ha, sawah terluas ada di Kecamatan Pancung Soal dengan luas 9.226,47 ha yang terkecil ada di

Kecamatan Bayang Utara seuas 626,69 ha, lahan kering didominasi oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti seluas 5.020,48 ha dan terkecil terdapat di Kecamatan Basa IV Balai Tapan 17,96 ha, permukiman terluas terdapat di Kecamatan Sutera seluas 1.166,51 ha dan terkecil terdapat di Kecamatan Bayang Utara seluas 30.69 ha (Laporan SLDH Pesisir Selatan, 2010:II-3-4).

Selain itu, kerusakan hutan didominasi oleh kegiatan perambahan hutan seluas 97 ha, diikuti oleh kegiatan kebakaran lahan seluas 65 ha dan penebangan liar seluas 20 ha. Pengalihfungsian hutan (konversi hutan) Tahun 2010 lebih banyak digunakan untuk kegiatan perkebunan seluas 43.170.000.000 km², kegiatan Hutan Rakyat seluas 40.168.000.000 km², kegiatan pertanian 34.960.000.000 km² dan untuk permukiman seluas 32.380.000.000 km² (Laporan SLDH Pesisir Selatan, 2010:II-5)

Namun, disaat pemerintah daerah pesisir selatan melakukan rehabilitasi, perambahan dan penebangan liar juga terjadi, bahkan proses penebangan liar lebih cepat dari proses rehabilitasi kualitas hutan lindung tersebut. Selain itu, permasalahan yang terjadi adanya pembukaan lahan pemukiman oleh masyarakat. Masyarakat beranggapan mereka membangun pemukiman di tanah/hutan adat, sementara pemerintah mengatakan masyarakat membuka pemukiman baru di hutan lindung Negara. Ini berarti terjadi tumpang-tindih dalam penggunaan hutan oleh pemerintah dan masyarakat. Jika masalah ini terus berlarut, maka konflik antar pemerintah dengan masyarakat ini akan selalu terjadi dan masyarakat akan menjadi korban hukum pidana.

Tidak hanya itu, kondisi hutan yang sangat luas namun tidak diiringi dengan jumlah personel polisi hutan, akhirnya berimbas pada tidak maksimalnya pengawasan hutan lindung TNKS dan hutan lindung pinggi pantai. Selain itu, strategi yang selama ini dilaksanakan pemerintah pesisir selatan penulis nilai belum maksimal. Untuk itu, penulis mencoba untuk memberikan inovasi strategi baru dalam usaha peningkatan kualitas hutan lindung ini.

Melihat dari kondisi hutan di Pesisir Selatan ini, telah menarik minat penulis untuk meneliti, mengetahui dan mempelajari mengenai bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan kualitas hutan lindung dalam rangka terlaksananya program penataan ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengambil judul **“Strategi Peningkatan Kualitas Hutan Lindung dalam Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan”**.

B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut;

- a. Kabupaten Pesisir Selatan adalah wilayah yang rawan akan bencana alam seperti banjir, longsor dan tsunami.
- b. Kabupaten Pesisir Selatan berada dalam kondisi darurat tata ruang yang diakibatkan oleh berbagai inkonsistensi dalam proses perencanaan.
- c. Kawasan hutan lindung di Pesisir Selatan dalam keadaan kritis
- d. Sarana dan prasarana dalam menunjang peningkatan kualitas kawasan hutan lindung masih minim.

- e. Akses menuju hutan lindung sangat terbatas, karena kabupaten Pesisir Selatan hanya memiliki satu poros jalan yang terletak di pesisir pantai barat Sumatera.
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Pesisir Selatan dalam menjaga fungsi hutan lindung
- g. Adanya alih fungsi hutan lindung menjadi pertambangan dan perkebunan

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini dibatasi menjadi beberapa permasalahan. *Pertama*, daerah Pesisir Selatan merupakan daerah yang rawan dengan bencana banjir dan longsor, untuk itu diperlukan strategi yang pas dalam meningkatkan kualitas hutan lindung di kabupaten Pesisir Selatan. *Kedua*, hambatan/kendala dalam usaha peningkatan kualitas hutan lindung tersebut.

3. Rumusan Masalah

Mengingat sangat pentingnya hutan lindung tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kualitas hutan lindung di daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih nyaman dan produktif?
- b. Apa kendala yang dialami pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dalam hal peningkatan kualitas hutan lindung tersebut?
- c. Bagaimana upaya pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan kualitas hutan lindung tersebut?

C. Fokus Penelitian

Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, Kabupaten Pesisir Selatan adalah wilayah yang rawan akan bencana alam seperti banjir, longsor dan tsunami; *Kedua*, kondisi hutan lindung di Pesisir Selatan dalam keadaan kritis, *Ketiga*, Masih rendahnya kesadaran masyarakat Pesisir Selatan dalam menjaga fungsi hutan lindung dan sempadan pantai. *Keempat*, kurangnya polisi hutan dalam melakukan pengawasan hutan lindung.

Masalah ini penting untuk diteliti karena sampai saat ini, kondisi hutan lindung di Pesisir Selatan belum dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan dapat dikatakan belum produktif. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka penulis memfokuskan penelitian ini sampai demikian.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kualitas hutan lindung di daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih nyaman dan produktif.
2. Mengidentifikasi kendala yang dialami pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan peningkatan kualitas hutan lindung tersebut.
3. Mendeskripsikan upaya pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan kualitas hutan lindung dan sempadan pantai

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat penulis bagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pada pendekatan ilmu pengetahuan dalam Administrasi Negara terutama yang berkaitan dengan konsep Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman serta sebagai bahan masukan informasi bagi praktisi, masyarakat serta pengambil kebijakan yang nantinya berguna dalam penentuan kebijakan untuk melaksanakan strategi peningkatan kualitas hutan lindung di kawasan kabupaten Pesisir Selatan dan daerah lain di Indonesia.
- b. Sebagai sumbangan ilmu dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan penulis bahas
- c. Bagi penulis, untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang